



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA : ANGGOTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOKO SASMITO**
2. Jabatan : **ANGGOTA KOMISI YUDISIAL**
3. NHK : **66771**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.825.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/280 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m²/220 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/84 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/100 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 230.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 81.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.563.840.160**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 4.699.840.160

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.699.840.160

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.